

Analisis Pendidikan Kewarganegaraan Di Kolombia

Muhammad Muslim Hidayatulloh^{a,1}, Elly Nur Rahmawati^{b,2*} Samsuri^{c,3*}

^a Pordi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah

^b Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

^c Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

¹ mmhidayatulloh.911@gmail.com 083154746312

² ellynur.2022@student.uny.ac.id 085643925644

³ samsuri@uny.ac.id 081805950338

Abstrak

Tulisan ini mencoba memberikan pandangan terhadap konsep Pendidikan Kewarganegaraan di Kolombia sesuai kultur dan kompetensi kewarganegaraan nasional Kolombia yang dirancang untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai, serta mendeskripsikan perbedaan pemahaman, dengan melibatkan generasi muda dalam pengambilan keputusan bersama serta keterlibatan secara demokratis di sekolah. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Dengan menggali referensi melalui kajian teoritis terhadap dokumen-dokumen baik jurnal maupun buku yang berkaitan dengan topik masalah. Program Pendidikan Kewarganegaraan di Kolombia telah berusaha untuk menanggapi tantangan negara. Ini telah diakui bahwa pengetahuan fakta dan konsep tidak cukup untuk mengembangkan kompetensi sehingga membutuhkan cara penting dari belajar dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku moral politik dalam mengembangkan sosial dan pribadi yang telah ditekankan menjadi lebih empatik.

Kata Kunci: Kolombia, Pendidikan Kewarganegaraan, Kompetensi Kewarganegaraan

Abstract

This paper tries to provide an overview of the concept of Citizenship Education in Colombia according to Colombian national civic culture and competence which is designed to encourage peaceful conflict resolution, as well as describe differences in understanding, by involving the younger generation in joint decision-making and democratic involvement in schools. The method used in this article uses a library research approach. By exploring references through theoretical studies of documents, both journals and books related to the topic of the problem. The Citizenship Education Program in Colombia has sought to respond to the country's challenges. It has been recognized that knowledge of facts and concepts is not sufficient to develop competence so that it requires an important way of studying the various factors that influence political moral behavior in social and personal development which have been emphasized to be more empathetic.

Keywords: Colombia, Citizenship Education, Citizenship Competence

1. Pendahuluan

Pendidikan sebagai aspek tidak terpisahkan dari praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan pendidikan di negara-negara manapun menjadi ujung tombak bagi negara dalam rangka mencapai tujuan negara itu sendiri. Di belahan dunia manapun pendidikan terus diupayakan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Negara-negara di dunia berusaha dan meyakini sebaik mungkin bahwa pendidikan sebagai aspek penting dalam mewujudkan peradaban negara yang semakin baik. Mewujudkan peradaban seperti yang dicita-citakan negara mutlak membutuhkan pendidikan sebagai jalur utama pengembangan sumber daya manusia baik secara intelektual maupun watak warga negara yang baik. Pengembangan pengetahuan dan watak warga negara yang baik merupakan visi utama Pendidikan Kewarganegaraan (Civis Education/Citizenship education/PKn) persekolahan maupun kemasyarakatan. Masyarakat dan generasi mudanya di persiapkan untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Keinginan itu lebih tepat disebut sebagai perhatian atau kepedulian yang terus tumbuh, khususnya dalam masyarakat demokratis. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tidak satupun negara di belahan dunia ini, termasuk Amerika Serikat, telah mencapai tingkat pemahaman serta penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganya untuk pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional di negaranya (Branson, 1999: 3).

Pendidikan Kewarganegaraan di Kolombia sesuai kultur dan kompetensi kewarganegaraan nasional Kolombia yang dirancang untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai, serta mendeskripsikan perbedaan pemahaman, dengan melibatkan generasi muda dalam pengambilan keputusan bersama serta keterlibatan secara demokratis di sekolah. Masalah-masalah konflik sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Kolombia, seperti ketidaksetaraan, diskriminasi masyarakat sipil yang lemah disebabkan salah satu faktor ilegalitas dan perdagangan narkoba di Kolombia. Kementrian Pendidikan berusaha mengatasi masalah konflik tersebut memulai program Pendidikan Kewarganegaraan, dengan harapan memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan dengan mendirikan solusi alternatif. Program inovatif Pendidikan Kewarganegaraan ini dicoba untuk mengatasi tindakan kekerasan di Kolombia, sebagai cara untuk memecahkan masalah endemik negara dengan mengembangkan kompetensi siswa, guru, dan peserta lain dalam pendidikan. Kompetensi meliputi hak suara, dan hak berbicara bagi orang lain, kemampuan komunikasi, refleksi pada tindakan, pengetahuan, dan partisipasi aktif dalam kelas, sekolah, maupun pada lingkungan masyarakat.

Kolombia, negara keempat terbesar di Amerika Latin telah mempraktekkan pemerintahan demokrasi selama bertahun-tahun. Pertumbuhan ekonomi juga telah stabil, dan pencapaian artistik telah terkenal (Branson, 1999: 33). Namun, Kolombia terkenal pada indeks tingkat kekerasan paling tinggi, pembunuhan yang terdaftar pada tahun 2005 (meskipun statistik ini menunjukkan penurunan dari 15.685 pada tahun 2004). Konteks dan sumber kekerasan ini sangat kompleks. Meskipun dapat ditelusuri secara sosiologi peristiwa politik tidak terkait dengan perdagangan narkoba ilegal dalam

beberapa tahun terakhir. Kekerasan telah terjadi konfrontasi antara kelompok yang bersaing untuk merebut kekuasaan. Berbagai dimensi dalam pencegahan atau penyelesaian masalah kekerasan di Kolombia dipimpin oleh aktivis sosial untuk merefleksikan nilai-nilai pendidikan. Di sisi lain sistem pendidikan Kolombia sekarang mendorong sekolah-sekolah dan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengatur, mengelolah dan mengembangkan lembaganya sendiri.

Kebijakan Pendidikan nasional di Kolombia didasarkan pada asumsi bahwa sekolah harus memiliki kapasitas internal untuk mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum dalam pelaksanaan program pendidikannya. Olehnya itu pemerintah menyadari bahwa kebutuhan hidup setiap masyarakat Kolombia yang berbeda, percaya bahwa setiap daerah perlu menentukan pendekatan pendidikan sendiri. Kementerian Pendidikan telah menetapkan standar nasional untuk kualitas pendidikan dalam pengembangan kompetensi dalam lima bidang penting yaitu matematika, bahasa, ilmu sosial, dan kompetensi kewarganegaraan. Melalui pendekatan demokratis ini langkah-langkah akuntabilitas sangat penting, sekolah bertanggung jawab untuk menunjukkan akuntabilitas di bidang standar yang akan dicapai dalam pembelajaran (Villegas-Reimers, 1994).

Program Pendidikan Kewarganegaraan di Kolombia bertujuan untuk mengatasi masalah konteks sosial yang kompleks dalam hal menciptakan cara baru yang demokratis untuk mengatasi kekerasan saat ini dan masalah-masalah sosial dan politik yang terjadi. Program Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting yang dapat memberikan kontribusi dengan cara negosiasi untuk menciptakan suatu perdamaian struktur sosial ekonomi dan politik di Kolombia. Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis akan melakukan analisis Pendidikan Kewarganaraan di Kolombia dengan mengidentifikasi beberapa unsur diantaranya: Sistem Pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan, Kompetensi Kewarganegaraan, dan Strategi Evaluasi.

2. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode tinjauan sistematis yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan terkait dengan spesifik pertanyaan penelitian, topik spesifik, atau fenomena yang menjadi perhatian (Kitchenham, 2004). Sumber data penelitian ini adalah orang dan makalah. Sumber daya yang data yang dikumpulkan dipilih secara purposive baik jurnal maupun buku yang berkaitan dengan topik masalah. Terdapat 3 artikel diantaranya Civics and Citizenship Theoretical Models and Experience in Latin America, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran), ICCS Encyclopedia Approachs To Civic And Citizenship Around The World yang dijadikan sumber kajian utama. Selain itu dibantu juga dengan beberapa sumber buku maupun jurnal internasional lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Sistem Pendidikan di Kolombia

Kurikulum di Kolombia dirancang oleh Bagian Kurikulum Asisten Pedagogik Dinas Pendidikan Umum. Kementerian Pendidikan menerbitkan daftar landsan (filosofis, psikologis, sosiologis, epistemologis, dan pedagogis) dan kerangka umum untuk setiap bidang studi dan kurikulumnya. Sistem pendidikan di Kolombia dibagi menjadi dua tingkatan. Pertama Pendidikan Dasar yakni Dasar Primer (Kelas 1-5) dan Dasar Sekunder (Kelas 6-9). Kedua Pendidikan Menengah Kelas 10-11. Kemudian *Preschool* atau kelas 0 diperkenalkan sebagai bagian dari sekolah pada tahun 1990. Di Kolombia dilaksanakan juga pendidikan moral dan pendidikan demokrasi.

Pendidikan moral di Kolombia diselenggarakan melalui mata pelajaran Pendidikan Agama, Moral, dan Etika. Diimplementasikan melalui beberapa tema sesuai tingkatnya dan disajikan dalam konteks ajaran Katolik (Villegas-Reimers, 1994). Pada tahun 1991 sebuah konstitusi baru disetujui di Kolombia dengan penekanan pada hak asasi manusia berakhir beberapa abad dari monopoli pendidikan moral oleh Gereja Katolik Roma (Patti & Espinosa, 2007). Agama Katolik menjadi mayoritas penduduk di Kolombia, namun konstitusi baru diakui sebagai kebebasan beragama. Dua dekade terakhir upaya untuk membangun Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat menumbuhkan ikatan etika yang sesuai perkembangan sosial dan politik yang dapat dibangun dari keberagaman tersebut.

Pendidikan demokrasi diajarkan di Kolombia melalui sekolah diajarkan di kelas 2-5 sebagai bagian dari ilmu sosial dan di kelas 10-11 sebagai mata pelajaran sendiri, namun tidak ada kurikulum khusus untuk pendidikan demokrasi. Guru membuat bahan ajar dan materi secara mandiri tidak disediakan oleh Kementerian Pendidikan (Villegas-Reimers, 1994). Namun terdapat acuan umum mengenai tema besar pendidikan demokrasi pada setiap tingkatan. Menurut (van der Ploeg, 2019) Pendidikan demokrasi harus memenuhi dua tujuan utama: mengajarkan siswa berpikir kritis dan mempersiapkan mereka untuk peran sosial. Pada implementasinya pemerintahan otonom demokratis, rakyat secara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri (Branson, 1999). (Benhabib, 2002) berpendapat bahwa demokrasi dan kewarganegaraan dapat hidup bersama karena yang pertama melihat pendidikan sebagai proses persetujuan dan partisipasi, dan yang kedua menunjukkan rasa memiliki yang ditunjukkan orang ketika disosialisasikan melalui praktik dalam pendidikan.

Pendidikan Kewarganegaraan di Kolombia

Menurut konstitusi Kolombia dalam Pasal 41 UUD 1991 menerangkan bahwa “ di semua lembaga pendidikan negeri dan swasta wajib mempelajari konstitusi dan pendidikan kewarganegaraan melalui metode yang sama untuk mengajarkan praktik demokrasi untuk mempelajari prinsi-prinsip dan nilai-nilai untuk mendorong partisipasi kewarganegaraan. Di Kolombia, pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan adalah mata pelajaran lintas kurikuler. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai bagian dari semua bidang studi, dan tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang, secara bersama-sama, memungkinkan pemuda Kolombia untuk bertindak secara konstruktif di masyarakat.

Pendekatan lintas kurikuler untuk kewarganegaraan di Kolombia juga dicapai dengan memperlakukan standar sebagai komponen transversal dari program sekolah, pengalaman kelas, etos kelas, dan bahkan sebagai "ruang" khusus di mana siswa dapat melatih pengetahuan kewarganegaraan mereka dan mempraktikkan keterampilan kewarganegaraan mereka. Sepanjang semua tingkat sekolah mereka, siswa terlibat dalam pertemuan sekolah, acara khusus, dan kegiatan ekstrakurikuler yang sepadan dengan pengajaran wajib dari ajaran konstitusi nasional Kolombia. Karena sifat lintas kurikuler pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan, guru mata pelajaran apapun dapat memikul tanggung jawab untuk pendidikan kewarganegaraan, sesuai dengan kerangka PEI sekolah mereka dan kepentingan pribadi mereka. Guru yang mengampu pendidikan kewarganegaraan yang memiliki pelatihan atau pendidikan di bidang-bidang yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, filsafat, dan agama. (Ainley et al., 2013).

Pendidikan Kewarganegaraan di Kolombia belum menjadi pelajaran tersendiri sejak 1976. Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial di kelas 1-5 pendidikan dasar. Pada siswa kelas 10-11 pendidikan menengah bisa mengikuti mata kuliah demokrasi melalui program nonformal. Berikut tabel tema-tema yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan.

Tabel 1. Tema-Tema dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas	Tema
Tingkat 1	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain - Norma untuk hidup berkelompok - Berbagi dan membantu sesama - Norma, hubungan, dan otoritas di sekolah - Identitas individu sebagai anggota masyarakat - Elemen persatuan negara Kolombia - Lambang Negara
Tingkat 2	<ul style="list-style-type: none"> - Rasa kepemilikan masyarakat dan bangsa - Norma-norma - Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan solusinya
Tingkat 3	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan lokalitas dan kewilayahan - Kotamadya sebagai unit sosial politik - Permasalahan otoritas kota - Kebudayaan dan pranata sosial sebagai sarana komunikasi budaya
Tingkat 4	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan tingkat lokal, regional, dan nasional
Tingkat 5	<ul style="list-style-type: none"> - Konstitusi - Hubungan dunia internasional

Tema-Tema dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Kolombia memiliki kompetensi kewarganegaraan Menurut (Print, 2013) kajian-kajian pendidikan kewarganegaraan secara umum berkaitan dengan kompetensi pengetahuan kewarganegaraan antara lain: pemerintah dan lembaga, hak dan tanggung jawab warga negara, identitas nasional, sejarah dan konstitusi serta sistem hukum dan supremasi hukum; hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokrasi;

partisipasi aktif warga negara dalam isu-isu sipil; perspektif internasional; dan nilai kewarganegaraan demokratis.

Kompetensi Kewarganegaraan

Standar kompetensi kewarganegaraan dirumuskan oleh sekelompok ahli dari berbagai daerah di Kolombia, termasuk peneliti, guru sekolah, pemimpin organisasi non pemerintah, dan pembuat kebijakan. Setelah berbulan-bulan disebuah konsensus kolektif, menulis, mervisi, sesuai standar terbitkan pada tahun 2003. Standar ini ditetapkan sebagai kriteria umum minimum setiap siswa harus mengembangkan kompetensi kewarganegaraan di semua sekolah di Kolombia. Untuk komunitas pendidikan, administrator, guru, dan orang tua total 30.442 dari lembaga pendidikan (Vasco, 2003).

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi serta mengembangkan keterampilan, melalui proses pembelajaran yang lebih interaktif (Kerr, 1999). Evolusi Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan pergeseran paradigma” berasal dari gagasan kompetensi (Cox et al., 2005) Standar kompetensi Kewarganegaraan di Kolombia tentu mewujudkan evolusi konseptual yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai tingkat perkembangan dalam tiga bidang yang didefinisikan sebagai dimensi: hidup bersama (Convivencia), perdamaian; partisipasi, tanggung jawab, demokratis, pluralitas, identitas, dan nilai perbedaan. Dimensi ini didasarkan pada dimensi transversal keempat yang diperlukan di seluruh standar: menghormati dan membela hak asasi manusia. Tiga dimensi lebih disempurnakan dari tingkat perkembangan jenis kompetensi kewarganegaraan dan lebih spesifik standar yang memberikan rincian dari standar umum. Masing-masing dimensi dengan kompetensi kewarganegaraan dan tingkat perkembangan yang tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Standar Kompetensi Kewarganegaraan

Dimensi	Tingkat Kelas Contoh
Convivencia (hidup bersama) dan perdamaian:	Keempat untuk kelas lima: Standar umum:
Standar ini mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan untuk membangun perdamaian dan hidup berdampingan dengan orang lain, serta dengan alam.	dengan cara damai dan konstruktif, sekolah konflik sehari-hari dan kehidupan keluarga dan berkontribusi terhadap perlindungan hak-hak anak.
Partisipasi dan tanggung jawab yang demokratis:	Pertama untuk kelas tiga: Standar umum
Standar ini mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan untuk memahami dan berpartisipasi aktif dalam konteks demokrasi, dalam parameter fakta sosial (misalnya, perjanjian kelas, hukum nasional).	berpartisipasi, dalam konteks langsung saya (dengan keluarga saya dan teman sekelas), dalam pembangunan perjanjian dasar tentang norma-norma untuk pencapaian tujuan bersama dan saya mengikuti mereka.
Pluralisme, identitas, dan penghargaan keanekaragaman:	Kelas Sepuluh sampai Kelas Sebelas Standar umum
Standar ini mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan untuk memahami dan	menolak segala bentuk diskriminasi atau

keragaman nilai sebagai kesempatan untuk menghindari diskriminasi dan prasangka.	pengucilan sosial dan menggunakan mekanisme demokratis untuk mengatasi diskriminasi dan menunjukkan rasa hormat terhadap keberagaman
--	--

Sumber: *Ministerio de Educacion de Colombia* (2005: 16-25)

1. **Kompetensi emosional**, adalah dipraktekkan melalui pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mengidentifikasi emosi dan menanggapi secara konstruktif kepada siswa. Di kelas empat dan kelas lima dalam dimensi Convivencia, siswa akan berusaha untuk mencapai sikap seperti sebagai berikut. Saya menggunakan mekanisme untuk mengelola kemarahan saya (seperti ide untuk menenangkan diri, bernapas dalam-dalam, menjauhkan diri dari situasi, menghitung sampai sepuluh, dan banyak lagi).
2. **Kompetensi kognitif**, memerlukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk di implementasikan memerlukan proses mental yang penting untuk warganegara, seperti analisis kritis dan perspektif. Misalnya, siswa kelas delapan dan sembilan berjuang untuk memenuhi partisipasi dan standar tanggung jawab.
3. **Kompetensi komunikatif**, memerlukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk membangun dialog yang konstruktif, seperti aktif mendengarkan, mengeluarkan pendapat secara tegas dan jelas.
4. **Pengetahuan**, adalah informasi dasar yang harus diketahui dan dipahami sebagai siswa sebagai warga negara, seperti organisasi negara atau hukum nasional dan internasional. Misalnya, siswa di kelas kesembilan dan kesebelas dalam dimensi partisipasi dan tanggung jawab akan berusaha untuk menguasai konsep ini: Saya memahami bahwa ketika tindakan korupsi yang dilakukan dan barang publik yang digunakan untuk kepentingan pribadi, akan mempengaruhi semua kepentingan masyarakat.

Di Kolombia istilah kompetensi telah didefinisikan secara fleksibel untuk mengetahui bagaimana yang dapat digunakan atau dimasukkan ke dalam konteks yang berbeda. Tetapi disini lain definisi ini tidak mempertimbangkan aspek penting dari perilaku yang kompeten, seperti pemantauan aktivitas mental sendiri, pemahaman tentang makna kegiatan, dari implikasi etis, sosial, dan politik, (Vasco, 2003). Dengan demikian kompetensi yang didefinisikan sebagai seperangkat materi atau konten, kemampuan, sikap, pemahaman dan kognitif, sosial afektif, dan psikomotorik di posisi yang saling terkait dalam rangka untuk memungkinkan kinerja yang fleksibel, efisien dari suatu kegiatan atau tugas-tugas tertentu, dalam konteks yang relatif baru dan menantang (Vasco, 2003).

Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu membangun keterampilan komunikasi yang efektif dan dialog rasional di antara individu-individu. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mereka belajar untuk mendengarkan dengan empati, menghargai perbedaan pendapat, dan mengajukan argumen yang masuk akal. Menurut (Miller, 2020). Kompetensi kewarganegaraan mengacu pada seperangkat

kompetensi kognitif, emosional, komunikatif, secara integratif yang dikoordinasikan di antara pengetahuan dan sikap yang dapat memungkinkan bagi seorang individu atau kelompok sosial yang berkembang untuk bertindak dengan cara yang konstruktif dan damai sehingga dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab secara demokrasi dalam pengambilan keputusan.

Pedoman untuk Program Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2003 jatuh dalam upaya pendidikan warga negara sipil. Dibalik program ini didirikan pada pengenalan terhadap Standar Kompetensi Kewarganegaraan. Standar yang dapat dibandingkan dengan target belajar dipahami sebagai kriteria bersama yang membangun pengetahuan dasar dan kompetensi bahwa semua anak-anak di berbagai daerah Kolombia memiliki hak untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Kementerian dan Association of Colleges, Guru membentuk kelompok dari semua jenjang pendidikan, peneliti, pengembang tes, dan administrator untuk membuat draft standar kewarganegaraan yang kemudian dikirim ke Sekolah, pendidikan formal (menawarkan dua tahun pendidikan guru setelah sekolah tinggi), guru dan orang tua di berbagai daerah di Kolombia untuk menerima umpan balik, setelah menerima umpan balik dan membuat beberapa modifikasi akan mencoba diterbitkan standar di surat kabar utama negara dan didistribusikan secara nasional melalui semua Sekretariat Pendidikan (UNESCO, 2005:62)

Sesuai dengan gambaran diatas dengan konteks ketidaksetaraan, partisipasi masyarakat dan endemik kekerasan. Kementerian Pendidikan mempunyai peran penting untuk mengatasi tantangan ini dengan penguatan dan implementasi program kewarganegaraan yang menekankan tidak hanya pengetahuan kewarganegaraan tetapi konsep-konsep seperti hukum, demokrasi, konstitusi, dan sistem hukum merupakan unsur- unsur lain yang mempengaruhi perilaku kewarganegaraan. Setelah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan warga negara baik, disimpulkan bahwa kompetensi harus diatur dalam tiga kelompok yaitu hidup berdampingan secara damai; partisipasi demokratis tanggungjawab, pluralitas, Identitas dan penyatuan dalam perbedaan yang merupakan inti dari tantangan Kolombia. Masing-masing kelompok mewakili dimensi fundamental untuk memberikan Pendidikan Kewarganegaraan dan memberikan kontribusi untuk menghormati serta membela hak asasi manusia yang sesuai dengan konstitusi(Patti & Espinosa, 2007).

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diperoleh di sekolah dan keluarga. Tetapi juga dilingkungan masyarakat dan melalui media, dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. (Patti & Espinosa, 2007). Namun, sekolah merupakan lingkungan yang paling efektif dimana untuk proses Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun lingkungan baik, di rumah dan di sekolah dalam rangka mendukung pelaksanaan kompetensi kewarganegaraan. Dewey berpendapat untuk tujuan pendidikan yang lebih luas yaitu menumbuhkan semangat sosial pada siswa (Lance E. Mason, 2017). Semangat sosial di dukung melalui kecakapan warganegara yang dibangun melalui pendidikan Kewarganegaraan (Logan, 2016).

Strategi Evaluasi

Setelah publikasi Standar dan menggunakan tes kewarganegaraan dikembangkan di Bogota, Kementerian Pendidikan menciptakan alat penilaian yang berguna untuk membantu guru lebih memahami perilaku, sikap, penalaran moral, dan interaksi sosial siswa. Matematika, bahasa, ilmu alam dan sosial dan tes kewarganegaraan, diambil pada akhir kelas 5 (10-12 tahun) dan kelas 9 (14-16 tahun), dikembangkan untuk memberikan informasi umum tentang siswa mereka. Bagian dari tes kompetensi kewarganegaraan adalah untuk mendorong para guru bekerja dengan cara mengevaluasi perilaku siswa dengan membantu memahami berbagai komponen pembangunan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan strategi pengajaran. Tujuan lain dari tes adalah untuk mengetahui kemampuan siswa secara umum dan kelemahan dalam suatu iklim sekolah, strategi pengajaran, hubungan dengan masyarakat, dan membantu para guru, staf administrasi mempersiapkan rencana perbaikan mutu sekolah, (Blumenfeld et al., 1997).

Strategi evaluasi pembelajaran, seperti mengembangkan kriteria evaluasi berdasarkan karya siswa sendiri, penilaian portofolio, rubrik untuk menunjukkan perkembangan, misalnya interaksi dan kemampuan komunikasi juga sedang dikembangkan oleh Sekolah, dan Kementerian Pendidikan. Beberapa soal tes juga diwajibkan dalam ujian masuk perguruan tinggi sehingga jelas bahwa kompetensi kewarganegaraan memang penting untuk seluruh sistem pendidikan formal.

4. Kesimpulan

Negara Kolombia dalam Konstitusi Baru 1991, diperlukan sebuah visi baru yang dapat mengintegrasikan pluralisme sosial dan budaya di tengah-tengah kekerasan politik dalam kondisi negara yang terus terkoyak. Sehingga negara harus bergerak menuju Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat menciptakan nilai-nilai dan kompetensi bagi demokrasi yang selalu berkembang. Program Pendidikan Kewarganegaraan telah berusaha untuk menanggapi tantangan negara. Ini telah diakui bahwa pengetahuan fakta dan konsep tidak cukup untuk mengembangkan kompetensi sehingga membutuhkan cara penting dari belajar dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku moral politik dalam pengembangan sosial dan pribadi yang telah ditekankan menjadi lebih empatik, menuju kebaikan bersama sehingga dapat meningkatkan partisipasi tanggung jawab dalam hal politik dan apresiasi tentang bagaimana etnis, gender, perbedaan sosial dalam memperkaya nilai-nilai baik kehidupan masyarakat.

5. Ucapan Terima Kasih

Apresiasi terhadap institute, penyandang dana, hibah, dan pihak-pihak terkait yang membantu kegiatan penelitian dan penulisan dapat ditulis disini. Jika tulisan merupakan bagian dari suatu *project* atau hibah penelitian, maka disebutkan sumbernya dan dapat ditambahkan nomor kontrak yang ada.

6. Referensi

Ainley, J., Schulz, W., & Friedman, T. (2013). ICCS 2009 encyclopedia: Approaches to civic and citizenship education around the world.

BENHABIB, S. (2002). *The Claims of Culture. Diversity Equality and in the Global Era*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Blumenfeld, P. C., Marx, R. W., Patrick, H., Krajcik, J., & Soloway, E. (1997). Teaching for understanding. *International Handbook of Teachers and Teaching*, 819–878.

Branson, M. S. (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.

Cox, C., Jaramillo, R., & Reimers, F. (2005). *Education for citizenship and democracy in the Americas: An agenda for action*. Washington, DC: Inter-American Development Bank.

Kerr, D. (1999). Citizenship education in the curriculum: An international review. *School Field*, 10(3/4), 5–32.

Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. *Keele, UK, Keele University*, 33(2004), 1–26.

Lance E. Mason. (2017). The Significance of Dewey's &em&gDemocracy and Education&/em&g; for 21<sup>st&/sup&g;-Century Education. *Education and Culture*, 33(1), 41. <https://doi.org/10.5703/educationculture.33.1.0041>

Logan, A. (2016). *Digital Citizenship in 21st Century Education* [Dominican University of California]. <https://doi.org/10.33015/dominican.edu/2016.edu.08>

Miller, B. (2020). Aristotle on citizenship and civic education: the central role of political participation. *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education*, 17–33.

Patti, J., & Espinosa, A. C. (2007). Citizenship competencies in Colombia: Learning from policy and practice. *Conflict Resolution Quarterly*, 25(1), 109–125.

Print, M. (2013). Competencies for Democratic Citizenship in Europe. *Civic Education and Competences for Engaging Citizens in Democracies*, 37–49.

van der Ploeg, P. A. (2019). Dewey and Citizenship Education: Schooling as Democratic Practice. In *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education* (pp. 1–14). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67905-1_20-1

Vasco, C. E. (2003). *Estándares básicos de calidad para la educación* [Basic quality standards for education]. Unpublished Document.(Bogotá, Ministerio de Educación Nacional).

Villegas-Reimers, E. (1994). *Civic education in the school systems of Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: Academy for Educational Development.